



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 845/I/2015

I/JANUARI 2015



KOMISI V APRESIASI KERJA KERAS BASARNAS



KOMISI V APRESIASI KERJA KERAS BASARNAS

Kerja keras Badan SAR Nasional (Basarnas) mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI yang telah mampu mengaplikasikan UU No.29/2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Basarnas sudah mampu menemukan indikasi korban dan pecahan pesawat sebelum 7 hari seperti diamanatkan UU tersebut.

Delegasi Komisi V DPR yang dipimpin Fary Djemy Francis mendatangi Kantor Basarnas di Kemayoran Jakarta, untuk mendapat informasi aktual seputar musibah jatuhnya pesawat Air Asia. Komisi V juga datang menemui Kepala Basarnas FHB Soelistyo, Senin (5/15), untuk memberi dukungan penuh atas kerja Basarnas.

“Kita datang untuk memberi dukungan, karena kita tahu dalam 2 hari Basarnas mampu menemukan tanda-tanda sekaligus melakukan pertolongan. Sampai hari ini sudah 34 jenazah yang ditemukan. Kemudian ditemukan lagi ada 3. Kita memberi dukungan penuh kepada Basarnas sebagai ujung tombak pencarian. Kita juga memberi dukungan politis,” kata Fary.

Dalam pertemuan dengan Kepala Basarnas, para anggota Komisi V berdialog dan banyak bertanya seputar sistem peralatan pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk bantuan dari luar negeri. Kepala Basarnas, Soelistyo menyatakan, dengan adanya musibah Air Asia ini, sekaligus menjadi wahana sosialisasi dan implementasi atas UU yang dihasilkan Komisi V DPR. Tugas utama Basarnas adalah mengevakuasi korban.

“Walau UU memberi tenggat waktu satu minggu, tapi dalam 3 hari kami sudah bisa memastikan temuannya. Dan perhatian dari DPR sangat kami hargai,” aku Soelistyo. Dijelaskan Soe-



Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR didampingi Kepala Basarnas menggelar Konferensi Pers

listyo, sampai saat ini, Basarnas didukung kekuatan bantuan 18 pesawat dan 28 kapal, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara-negara yang ikut membantu pencarian adalah Amerika, Jepang, Singapura, Rusia, Korea, dan Malaysia.

Delegasi Komisi V yang turut serta dalam kunjungan ini adalah Michael Wattimena, Yudi Widiana Adia, Anton Sukartono Suratno, A. Bakri, Syahrulan Pua Sawa, dan Sahat Silaban. Usai pertemuan, delegasi Komisi V dan Kepala Basarnas menggelar jumpa pers di lobi kantor Basarnas.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana (F-PKS) usai pertemuan dengan Kepala Basarnas, Senin (5/15), menyatakan, peralatan pendukung untuk mengevakuasi para korban

di lapangan masih kurang lengkap. Selain itu, kekuatan personilnya juga perlu diperbaiki. “Basarnas perlu memperbaiki peralatan agar lebih tangguh sesuai medan bencana di Indonesia,” katanya di Kantor Basarnas, Kemayoran, Jakarta.

Yudi sangat mengapresiasi sistem komunikasi yang diterapkan Basarnas dalam mengoordinir semua bantuan dari dalam dan luar negeri untuk mengevakuasi para korban. Komunikasi yang terkoordinir menjadi kunci kesuksesan Basarnas dalam menemukan para korban dan reruntuhan pesawat. “Kita juga apresiasi masyarakat yang telah memberi informasi dan data-data sebagai bahan referensi bagi Basarnas untuk ditindaklanjuti,” katanya lagi.

(mh) foto: rizka/parle/hr



Hubungan Indonesia-Ekuador Akan Diperkuat



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf berdialog dengan Dubes Ekuador

Hubungan antara Indonesia dengan Ekuador menjadi topik perbincangan utama antara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Eduardo Alberto Calderon Ledesma. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Fadli, Gedung Nusantara III, Rabu (7/01/15).

Selain itu, kata Fadli usai pertemuan, dirinya dengan Dubes Ekuador juga membahas rencana sidang tahun ke-23 *Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF)* yang akan diselenggarakan di Quito, Ekuador, pada 10-17 Januari 2015. Sidang ini akan dihadiri oleh seluruh Parlemen negara di Asia Pasifik.

“Delegasi dari Indonesia akan diikuti 8 orang, dan akan saya pimpin langsung. Acara ini akan dihadiri oleh se-

luruh parlemen dari negara-negara di Asia Pasifik, Konferensi internasional ini akan membahas tentang masalah politik, ekonomi dan keamanan di seluruh Asia Pasifik. Lingkup bahasanya cukup luas,” kata Fadli.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini menambahkan, direncanakan dalam sidang, delegasi Indonesia akan mempresentasikan berbagai gagasan, sikap, maupun pendapatnya. Selain itu, di sela-sela jadwal acara yang padat, Delegasi Indonesia akan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara.

“Kami akan membuat pertemuan bilateral dengan beberapa negara penting, yang selama ini berkaitan hubungan dengan Indonesia. Terutama

antar parlemen, kami akan membuat *site meeting* dengan anggota parlemen yang merupakan sahabat Indonesia,” imbuh Fadli.

Politisi Gerindra ini menyatakan, khusus hubungan Parlemen Indonesia dengan Ekuador akan semakin diperkuat. Walaupun, saat ini belum terbentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) kedua negara. Pasalnya, Anggota GKSB Ekuador masih sama, namun untuk Anggota GKSB Indonesia harus baru, karena Anggota DPR baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Sehingga, bilateral *meeting* parlemen kedua negara juga akan membuat MoU terkait GKSB Indonesia – Ekuador.

“Kita ingin kerjasama kedua parlemen ini semakin kongkrit, bagaimana saling mendukung dalam resolusi yang terkait dengan kepentingan nasional dari kedua negara. Tentu isu yang memuat *mutual benefit* kedua negara, dalam hal ini misalnya *migrant worker* atau TKI. Dalam hal ini Indonesia juga memiliki kepentingan,” tambah Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Ekuador berharap hubungan parlemen kedua negara yang selama ini sudah terjalin akan semakin meningkat. Apalagi, Delegasi DPR sudah tiga kali mengunjungi Ekuador, begitu pula sebaliknya, Delegasi Parlemen Ekuador juga pernah berkunjung ke Indonesia.

Acara diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari Fadli kepada Dubes Ekuador, berupa keris asli Indonesia. Dubes Ekuador sangat terpuak dengan kenang-kenangan itu. (sf), foto : [naefurodjie/parle/hr](#)

Sekjen DPR Akan Tetap Jalin Silaturahmi Dengan P3S

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, kehadirannya dalam pertemuan rutin dengan anggota Pesatuan Pensiun Pegawai Sekretariat Jenderal (P3 S) DPR-RI adalah dalam rangka tetap menjalin silaturahmi. Sebab anggota P3S antara lain bekas Sekjen,

Wakil Sekjen, para pejabat dan pegawai Setjen DPR. Forum pertemuan ini juga sebagai *sharing* dengan melihat perkembangan pekerjaan Setjen DPR yang sangat dinamis.

“Inilah forum silaturahmi atau berkumpul dan yang terpenting para

anggota P3S mengikuti perkembangan “junior-yuniornya” yang sedang menunaikan tanggungjawab di Setjen DPR-RI,” kata Win, panggilan akrab Sekjen DPR usai memberikan sambutan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Laporan Pengurus P3 S DPR



Sekjen DPR Winantuningtyastiti bersalaman dengan Anggota P3S

tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2014, di Gedung DPR, Rabu (7/1).

Ikhwal hubungan Setjen DPR dengan P3 S, menurut Win, tetap terjalin dengan baik dan saling mendukung. Kadang melalui telepon menyampaikan saran-saran masukan sehingga dalam melaksanakan tugas bisa berjalan dengan baik. “Yang penting bagaimana silaturahmi ini tetap terjaga,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Win mengatakan, dirinya sangat senang, manakala diundang

acara seperti ini, sebab akan mengingatkan kembali saat sama-sama bertugas di Setjen DPR. Terkait dengan bantuan yang diberikan kepada P3S, dia mengatakan ada kegiatan yang bisa dijalankan bersama dan bisa bersinergi.

Ketua P3 S Toip Heryanto mengatakan, salah satu program P3S adalah selain membangun silaturahmi dengan para pensiunan, juga dengan pejabat sekretariat yang masih aktif. Karena bagaimanapun, ada hubungan kekeluargaan, karena para pensiunan pernah menjadi bagian dari Sekretariat

Jenderal DPR-RI.

Supaya hubungan tersebut tidak terputus, maka selalu digelar pertemuan rutin dan hingga sekarang tetap terjalin baik. Yang juga sangat menggembirakan, kalau ada pegawai yang mau pensiun, Pengurus P3S diundang memberi masukan bagaimana menghadapi purna tugas itu. Sehingga hubungan ini tetap berjalan baik hingga sekarang.

Wakil Penasehat P3S Faisal Djamal menyampaikan penghargaan kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Wakil Sekjen Ahmad Djuned dan para Deputi dan para Kepala Biro yang hadir serta Pengurus Korpri dan Pengurus Koperasi bisa hadir dalam acara ini. “Sangat membahagiakan dan membanggakan, ternyata meski sibuk masih bisa bersama-sama hadir para rapat P3S,” tegasnya.

Dia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pengurus, karena itu diharapkan program-program lain khususnya sosial perlu digenjut lagi. Dia juga berharap pada tahun 2015, Bu Sekjen tetap membantu dan mendampingi P3S, namun tidak terlalu membebani kepada Setjen DPR-RI. “Bisa melakukan kerja sama, tetapi harus terbuka dan akuntabel. Di jaman keterbukaan ini perlu dibuka sebaik-baiknya,” ungkap Faisal Djamal. (mp), foto : andri/parle/hr.

Kebijakan Gula Nasional Perlu Pro Petani

Pemerintah diminta melakukan revitalisasi dan koordinasi yang lebih baik untuk menyusun kebijakan daulat gula nasional. Kemendag, Kementan, Kemenperin serta instansi terkait lainnya perlu duduk bersama menetapkan kebijakan yang lebih memihak kepada pelaku utama yaitu petani tebu.

“Pemerintah perlu serius menyusun kebijakan daulat gula nasional, beri subsidi dan insentif yang sungguh-sungguh pada petani, hitung ulang kapasitas yang bisa dipasok oleh pabrik dalam negeri, lakukan pengetatan terhadap importasi gula,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1/15).

Ia menekankan kebijakan menaikkan harga gula, bukanlah solusi yang tepat pada saat ini karena harga gula yang

tinggi hanya menguntungkan untuk pabrikan gula yang telah efisien dan pedagang bukan petani.

Pada bagian lain wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV meminta pemerintah mencermati dugaan perembesan gula rafinasi ke pasaran. “Kemendag harus menghitung ulang dan mengevaluasi kebutuhan gula rafinasi, kalau terbukti terjadi perembesan gula rafinasi, izin importir harus dicabut,” tekannya.

Politisi FP Gerindra ini mengkhawatirkan tanpa disadari kebijakan gula nasional saat ini merupakan bagian dari skenario ‘tata kelola pangan global’ yang ujungnya menghancurkan petani dan Indonesia pada akhirnya bergantung dari impor. Itulah sebabnya dalam tahun 2015 ini pemerintah perlu



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

meningkatkan efisiensi pabrik gula lokal.

“Dengan rata-rata rendemen hanya 7,2 persen, biaya produksi gula berbasis tebu di dalam negeri mencapai Rp 8.500/kg. Sedangkan, gula mentah impor yang diolah menjadi gula rafinasi dapat dijual dengan harga hanya Rp



6.000-7.500/kg. Berarti gula refinasi lebih murah 1000 - 2000 per kg. Sementara, *willingnes to pay* (daya beli) kon-

sumen hanya Rp 6.000-7.500 per kg. Ini yang harus diantisipasi pada tahun 2015 dengan meningkatkan efisiensi pabrik

gula lokal minimal sampai 10 persen,” demikian Heri. (iky) foto : *ibnur/parle/hr.*

Pembubaran Lembaga-Lembaga Boros Harus Cermat dan Hati-hati

Pembubaran lembaga-lembaga yang dinilai memboroskan keuangan negara hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati dan melalui uji publik. Bahkan kalau perlu dikonsultasikan dengan DPR sehingga tidak menimbulkan konflik dan berpeluang menuai gugatan.

“Intinya harus ada kriteria khusus, lembaga apa saja yang layak dibubarkan. Tidak semua lembaga menggunakan anggaran negara, bahkan banyak lembaga swadaya masyarakat tanpa bantuan APBN tetapi memberi manfaat bagi masyarakat dan negara,” kata anggota DPR Endang Maria Astuti saat dihubungi Selasa (6/1).

Politisi Partai Golkar mengemukakan hal itu menanggapi langkah pemerintah yang akan membubarkan lembaga-lembaga yang dinilai memboroskan keuangan negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih melakukan pengkajian terhadap 40 lembaga non-kementerian dan non-struktural sebelum memutuskan untuk menghapus lembaga tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural, pada tanggal



Anggota DPR Endang Maria Astuti

4 Desember 2014. Kesepuluh lembaga yang dibubarkan itu antara lain, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, kemudian tugas dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke Kementerian Sosial, Dewan Buku Nasional, fungsinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Komisi Hukum Nasional oleh Menteri Hukum dan HAM, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Nasional didelegasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Endang, perlunya dibicarakan dengan DPR dimaksudkan untuk menghindari alasan yang kurang kuat dan berpeluang menimbulkan masalah baru. “Jadi jangan karena kira-kira lembaga tersebut merugikan negara dan melakukan pemborosan, tetapi perlu ada kriteria khusus. Apalagi kalau sudah diuji publik, maka ada kepastian lembaga apa saja yang layak dibubarkan,” tegasnya.

Di sisi lain, pembubaran lembaga-lembaga perlu dipikirkan dan diantisipasi jalan keluarnya terutama menyangkut tenaga kerja. Nasib mereka setelah tempat mencari nafkah dan kepentingan keluarganya juga harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga tidak menambah masalah. “Jangan sampai dengan membubarkan lembaga-lembaga non kementerian dan non struktural, menimbulkan masalah baru berupa bertambahnya pengangguran,” ucap Endang Maria menambahkan. (mp), foto : *andri/parle/hr.*

Parlemen Indonesia Kirim Delapan Anggota ke Sidang APPF Ekuador

Parlemen Indonesia mengirim delapan perwakilan dari DPR dalam rapat tahunan *Asia Pacific Parliamentary forum* di Quito, Ekuador ke 23, pada tanggal 9-17 Januari mendatang.

Dalam Forum Parlemen Asia Pasifik tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno, anggota BKSAP SB Wiryanto Sukamdani, Indro Hananto, Rachel Maryam Sayidina, Abdul Kadir Karding dan M. Arief Su-

ditomo. Dari DPD diwakilkan oleh tujuh orang anggotanya.

Direncanakan pertemuan forum parlemen Asia Pasifik ini akan membahas empat tema besar diantaranya, *Cooperation for advancing freedom, peace, democracy and prosperity*, Tema kedua *Open and exclusive cooperation for the expansion of free trade and investment, sustainable and environmentally friendly development*, kemudian tema lainnya *non military cooperation for matters regarding peace and regional securities*,

terakhir yaitu *preservation and promotion of the external and internal cultural exchange of the people of the region*.

APPF merupakan forum kerjasama non-eksklusif antar parlemen di wilayah Asia dan Pasifik yang diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone pada tahun 1993. Saat ini APPF beranggotakan 27 negara termasuk Indonesia. APPF merupakan wadah bagi para anggota parlemen guna membahas permasalahan bersama dan berbagi pengalamandi berbagai bidang



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat memberikan keterangan pers

yang menjadi *concern* masing-masing negara. Kerangka kerjasama APPF berfokus pada perdamaian, kebebasan, demokrasi, kesejahteraan, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan dan kerjasama non militer.

Dalam pertemuan APPF ke 22 lalu dihasilkan 22 resolusi lima diantaranya merupakan prakarsa Indonesia. Meskipun pembahasan pertemuan APPF juga mencakup isu perdagangan dan ekonomi, negara anggota APPF juga memberikan perhatian khusus terhadap isu perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan seperti antara lain terkait konflik antara Israel-Palestina, polemik Suriah, perseteruan di Semenanjung Korea, hingga isu pemberantasan Korupsi, penanggulangan terorisme dan narkoba. (Sugeng) foto: andri/parle/hr

PK Satu Kali, Perlu Hati-Hati



Anggota Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya diberikan satu kali dapat segera memberikan kepastian hukum. Hakim Agung perlu berhati-hati agar keputusan PK satu kali tidak blunder di masa yang

akan datang.

“Saya kira bagus untuk memberikan kepastian hukum, kalau tidak begitu putusan hakim akan menjadi mainan. Namun patut diingat kepercayaan publik terhadap PK satu kali akan menguat manakala hakim MA juga super hati-hati, jangan sampai putusan itu menjadi blunder dan MA kemudian akan dicibirkan,” kata anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat, (2/1/15).

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan kasus PK yang pernah diputuskan, kemudian tercium publik ada indikasi main mata dengan pihak berperkara. “Misalnya oknum hakim yang memperdagangkan PK kepada pihak yang punya kekuasaan dan modal,” tandasnya.

Polemik PK mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan PK dapat diberikan berkali-kali kepada terpidana. Kejaksaan Agung mengaku kesulitan menindaklanjuti eksekusi mati terpidana narkoba karena pelaku kembali mengajukan PK yang sudah pernah ditolak.

Menutup tahun 2014, MA menerbitkan Surat Edaran no.7/2014 yang menegaskan PK hanya diberikan satu kali. MA menyatakan putusan MK yang membolehkan PK berkali-kali, tidak dapat dieksekusi karena berdasarkan UU no.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 2; tidak ada PK di atas PK. (iky) foto: naefurodjie/parle/hr

Komisi III Ingin Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Satu Gedung

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menyampaikan adanya ide dari beberapa anggota fraksi di Komisi III

tentang penyatuan empat Ketua di lingkungan Peradilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi

Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer) dalam satu gedung di tingkat provinsi.



Menurutnya, hal tersebut digulirkan karena untuk menghemat biaya, perawatan, dan saling bekerja sama dalam 4 lingkungan peradilan ini. Jika dilihat sekarang antara gedung Ketua-ketua Pengadilan Tinggi itu terpisah berjauhan jaraknya. Mungkin perlu adanya gagasan dan kesepakatan secara politik, nyatanya di dalam pemeriksaan Tingkat Pengadilan Tinggi tidak akan bersidang secara fisik melainkan hanya memeriksa berkas-berkas perkara.

“Kami (Komisi III) mohon tanggapan dan masukan 4 lingkungan peradilan, jika ide itu berjalan secara politik tentang penyatuan tempat gedung. Walaupun nanti tempat bersidang dan levelnya ada lantai-lantainya bisa kita lakukan kajian, sehingga kita dapat mengirit pembiayaan, karena di tahun 2015 Anggaran Perubahan dari lingkun-



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin

ngan yudikatif Mahkamah Agung (MA) cukup besar,” ungkap Aziz Syamsudin (F-PC), saat Komisi III mengadakan per-

temuan dengan 4 lingkungan peradilan se-Provinsi DKI Jakarta, di Pengadilan Tinggi, Jakarta Selasa (23/12).

Pemikiran Komisi III dalam diskusinya bahwa di tingkat MA pun sudah menjadi satu. Tinggal di pengadilan Negeri di kabupaten dan kota karena masih bersidang secara fisik, mungkin perlu tetap dipertahankan pemisahan tempat gedungnya.

“Alangkah lebih efektif dan efisien dengan penyatuan gedung itu, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kesejahteraan para hakim seperti membayar renumerasi hakim, sarana dan prasarana, dan rumah dinas,” imbuhnya. Hasil dari kunker ini akan ditindaklanjuti saat rapat konsultasi dengan MA yang akan dilakukan pada awal tahun 2015. (as), foto : [agung su;istiono/parle/hr](http://agungsu.istiono/parle/hr).

Data Penerima Kompensasi BBM Perlu Diperbaiki



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI sidak ke Kantor Pos Medan

Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni di Pematang Siantar dan Karo, sementara kabupaten lainnya belum. “Jadi sebenarnya pemerintah belum siap secara total menggulirkan program perlindungan sosial,” tandas

Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay di sela-sela acara inspeksi mendadak di Kantor Pos Besar Medan, Sumut Senin (8/12).

Hal yang sama dikatakan anggota Tim Kunker Komisi VIII Achmad Mustaqim, dimana Dinsos setempat yang mengaku susah mengkonfirmasi data dengan PT Pos selaku penyalur dana kompensasi BBM, cukup membingungkan. Karena itu menjadi catatan penting Komisi VIII bahwa ada kekurangan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan Kantor Pos, sementara di dae-

ra-daerah, Dinsos tidak memiliki data.

Yang mencengangkan, kata Mustaqim, pihak Kantor Pos tidak diberi wewenang untuk mendistribusikan dana kompensasi tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan koordinasi dengan SKPD atau Pemda selaku pemangku kepentingan warga. Di Kantor Pos Besar Medan yang mempunyai tugas menyalurkan dana sebanyak 70 ribu warga, ternyata tidak mempunyai wewenang sinkronisasi dan koordinasi penyaluran dana kompensasi tersebut.

“Berdasarkan temuan tersebut, Komisi VIII DPR pada masa sidang mendatang akan panggil Mensos untuk memverifikasi data penerima dana kompensasi tersebut,” jelas Mustaqim. Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay bahkan mensinyalir data yang digunakan sudah kedaluwarsa sebab yang digunakan adalah data tahun 2011.

Sementara, kata Saleh yang juga politisi PAN, UU No.11 tahun 2011 pasal 8 ayat (5) tentang Fakir Miskin menyebutkan bahwa validasi dan verifikasi data itu minimal dilakukan sekali dalam dua tahun. “Ini hampir empat tahun, dan masih digunakan. Perlu dipertanyakan dalam raker dengan Kemensos dalam masa persidangan kedua Januari mendatang,” ungkap Saleh menambahkan. (mp), foto : [mastur prantono/parle/hr](http://masturprantono/parle/hr).

K-13 Perlu Diperbaiki, Bukan Dihentikan



Anggota Komisi X Jefirstson R. Riwu Kore

Komisi X menyayangkan kebijakan pemerintah menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Padahal, kurikulum ini sudah mulai diujicobakan dari tahun lalu, dan sudah memakan anggaran yang tidak sedikit. Walaupun masih banyak kekurangan dalam implementasinya, diharapkan pemerintah dapat memperbaikinya, bukan menghentikan.

Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi X Jefirstson R. Riwu Kore, saat dihubungi Parle via telepon, Rabu (24/12/14). Ia menilai, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar

Menengah terlalu terburu-buru menghentikan pelaksanaan K-13.

“Saya pribadi melihat keputusan menteri itu terlalu tergesa-gesa menghentikan K-13. Harusnya jangan membuat keputusan yang membuat bingung banyak pihak. Menteri juga belum berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan ini. Karena K-13 ini kan hasil rumusan yang sudah dikaji dan oleh Komisi X juga,” tegas Jefirstson.

Politisi Demokrat ini menambahkan, selama ini yang menjadi sorotan Komisi X adalah persoalan teknis di lapangan, bukan sisi substansi K13. Persoalan itu seperti buku yang belum terdistribusi dengan baik ke seluruh sekolah dan pelatihan guru yang belum dilaksanakan secara maksimal.

“Dari hasil kunjungan kerja Komisi X ke beberapa daerah, sebenarnya pelatihan guru sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kendala lain di lapangan. Tapi, seharusnya K-13 jangan dihentikan. Harusnya berbagai kelemahan itu diperbaiki secepat mungkin. Kalau dihentikan, ini kan justru masyarakat menjadi bingung,” herannya.

Padahal, tambah Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini, K-13 memiliki kelebihan dibanding Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah diterapkan sebelumnya. Ia menilai, K-13 jauh lebih bagus, karena sudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, ia meminta Menteri dapat mengkonsultasikan permasalahan ini dengan Komisi X DPR.

“Kebijakan penghentian K13 ini tidak memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Seharusnya, evaluasi dan perbaikan yang kurang, bukan menghentikan. Jangan mentang-mentang sudah menjabat Menteri langsung memutuskan seenaknya saja. Ini perlu konsultasi dengan DPR, jadi keputusannya jelas, dan tidak membingungkan banyak pihak,” tutup Jefirstson. (sf)/foto:odjie/parle/hr

Mendesak, Pemasangan Sistem Deteksi Dini di Daerah Rawan Bencana

Selain sebagai wilayah terbanyak potensi bencana, di seluruh wilayah tanah air pada bulan-bulan Desember hingga Pebruari telah memasuki musim bencana khususnya banjir dan tanah longsor. Karena itu sudah sangat mendesak pemasangan alat deteksi dini di daerah-daerah rawan bencana.

“Daerah-daerah rawan bencana sudah dipetakan, sehingga pemasangan alat deteksi dini secepatnya di realisasikan. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengantisipasi sehingga bisa mengurangi resiko jatuhnya korban,” demikian ditegaskan anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna, Rabu



Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna

(24/12).

Dihubungi melalui telepon di kediamannya, Tempuran, Magelang, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menyebutkan bahwa menyusul terjadinya bencana tanah longsor di Banjarnegara 12 Desember lalu, juga terjadi bencana serupa di Wonosobo, Jawa Tengah tak jauh dari Banjarnegara.

Menurut anggota Dewan asal Dapil Jateng ini, longsor di Wonosobo juga menimbulkun 14 rumah. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan juga terjadi bencana kebakaran di Pasar Induk Wonosobo. Masalahnya, di kabupaten ini belum dibentuk Badan Penang-



gulangan Bencana Daerah, padahal wilayah ini termasuk salah satu dari 5 daerah rawan bencana.

Potensi bencana di daerah ini, lanjut Muna, cukup banyak selain longsor juga kawah beracun Sinila yang menimbulkan korban cukup banyak beberapa waktu lalu. Yang juga disayangkan,

sistem deteksi dini bencana longsor di Banjarnegara dipasang setelah terjadinya yang menimbulkan korban jiwa ratusan jiwa.

Lebih lanjut Choirul Muna menegaskan, seharusnya Indonesia sebagai negara yang kaya aneka bencana memiliki 70 ribu alat deteksi dini, tetapi hanya

ada 50 unit. “Itupun banyak yang hilang dan dicuri orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya dengan menambahkan, pada masa sidang mendatang masalah ini akan disampaikan kepada BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

Potensi Udang di Sulsel Butuh Perhatian

Pemerintah Indonesia telah menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai wilayah percontohan tambak udang, hal ini dilakukan untuk menangkap potensi pasar seiring dengan kenaikan permintaan dan harga udang di pasar internasional. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan produksi udang dengan memanfaatkan tambak-tambak yang ada di wilayah Sulsel.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat pertemuan tim Kunker Komisi IV dengan Bupati Kabupaten Barru, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Litbang Perikanan Budidaya Provinsi Sulsel, belum lama ini.

“Dengan potensi ekspor udang Sulsel yang sangat menjanjikan, tentunya perlu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah bagi pelaku usaha besar dan kecil serta petani. Bagi para pelaku usaha kecil dalam budidaya udang, ketersediaan dan akses terhadap modal menjadi kendala yang sangat serius,” jelas Siti yang akrab dipanggil Titi.

Selain itu, tambah Titi, faktor infrastruktur yang terbatas terutama akses jalan, dikhawatirkan akan menghambat proses pengangkutan hasil panen, yang pada akhirnya menurunkan daya saing udang di pasar internasional.

“Dukungan dari pemerintah diharapkan dapat menstimulasi masyarakat melakukan budidaya udang. Daya dukung berupa sumber daya alam dan iklim yang sesuai bagi budaya udang dapat menjadi faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan daya saing udang Indonesia khususnya di pasar Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat,” tambah Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Barru, Andi Idris Syukur menjelaskan, luas tambak di Kabupaten Barru saat



Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto saat mengunjungi air terjun cagar alam di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Prov. Sulsel

ini mencapai kurang lebih 2.600 hektar terdiri dari tambak super intensif 190 hektar, sisanya tambak intensif. Tambak super intensif ini berisi jenis udang vannamei, yang memiliki kualitas tertinggi di jenisnya. Total produksi benih udang yang ada saat ini lebih kurang 2,6 miliar ekor.

“Kami berharap, Kementerian Kelautan di Kabupaten Barru ini dapat memfasilitasi untuk pemetaan (*mapping*) dari pesisir dalam rangka pengembangan budidaya laut dan juga budidaya tambak kedepan. Karena dengan tambak seluas 2.600 hektar ini kita akan menuju intensifikasi. Kita juga ingin mengoptimalkan budidaya laut berupa keramba, tentunya ini melalui *mapping* dari Kementerian Kelautan untuk mengarahkan hal-hal yang dapat kita bangun kedepan,” jelas Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepa-

la Pusat Litbang Perikanan Budidaya, Tri Heru Prihadi menjelaskan, pihaknya mempunyai kebijakan strategis dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang dimulai dan diakhiri juga oleh pengguna. Penelitian Litbang juga berdasarkan kebutuhan pasar dan membuat pasar.

“Hasil Litbang ini harus menunjang kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang bisa dihasilkan dari inovasi teknologi perikanan budidaya yang berdaya saing. Memang inovasinya masih sedikit, kemudian kualitas dan kuantitas peneliti juga memang masih terbatas. Sinerginitas terkait dengan penelitian juga masih kurang, walaupun sebenarnya ini bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hanya sarana dan prasarana yang belum optimal dengan anggaran yang diberikan. Jadi kami tidak bisa

mengarah kesana,” jelas Tri.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, produksi udang di Sulsel telah melampaui target. Sampai Mei 2014 produksinya mencapai 34.420 ton. Peningkatan produksi ini tidak

terlepas dari bertambahnya daerah penghasil udang di Sulsel. Saat ini Kabupaten Pinrang menjadi daerah yang paling produktif diantara lima daerah penghasil udang di Sulsel. Kelima kabupaten tersebut memiliki peranan

yang sangat signifikan terhadap hasil realisasi udang Sulsel pada tahun 2013, dimana masing-masing kabupaten menghasilkan 2-5 ton udang. (iw)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Para Srikandi dalam Upacara Hari Ibu di DPR



Suasana Upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-86

Perempuan ini melangkah tegap. Tangan dan kakinya mengayun pasti, matanya tertuju lurus ke arah mimbar. Langkahnya berhenti dengan satu hentakan lembut pada kaki kanannya. Sesaat kemudian ia berteriak lantang memecah keheningan.

“Lapor, upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-86 siap dimulai,” demikian sang komandan perempuan dalam upacara yang berlangsung di halaman Gedung Setjen DPR, Komplek

Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/14).

Komandan Upacara perempuan ini adalah Rizka Arinindya yang sehari-hari bertugas di Bagian Pemberitaan, Setjen DPR. Ternyata dia tidak sendiri, upacara dalam rangka Hari Ibu ke-86 kali ini seluruh petugas upacara adalah para wanita yang beraksi bagaikan Srikandi yang gagah berani.

Tiga petugas pengibar bendera, pembaca naskah Pancasila, Pem-

bukaan UUD 1945, sejarah Hari Ibu semuanya perempuan. Termasuk rombongan besar paduan suara yang menyanyikan Hymne Hari Ibu, semuanya juga perempuan.

“Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa,” demikian petikan Sejarah Hari Ibu yang dibacakan Sulis yang sehari-hari bekerja sebagai peneliti.

Suasana khidmad sangat terasa di lapangan upacara tidak jauh dari Gedung Nusantara II tempat para wakil rakyat melangsungkan rapat paripurna. Bertindak selaku inspektur upacara Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa yang disampaikan lis Anisa staf Sekretariat Kerja Sama Bilateral.

“Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami semangat dan kemampuan berbakti dan berdedikasi kepada bangsa dan negara.” Amin. Dari arah jejeran pasukan peserta upacara terdengar sautan, memohon Tuhan Yang Mahakuasa mengabulkan segala doa. (iky), foto : naefurodjie/parle/hr.

Sekjen DPR RI Lepas Tim Sukarelawan

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Senin (22/12) melepas Tim Sukarelawan yang akan menyerahkan langsung bantuan dari Pegawai dan staff Kesetjanaan DPR RI ke para korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

“Alhamdulillah setelah pekan sebelumnya Pimpinan dan anggota DPR mendatangi dan memberikan secara langsung bantuan korban longsor

di Banjarnegara, hari ini Tim sukarelawan Kesetjanaan DPR yang dipimpin Wasekjen, Pak Djuned akan berangkat ke Banjarnegara untuk menyerahkan bantuan dari seluruh pegawai, staff dan karyawan Kesetjanaan DPR yang jumlah keseluruhannya mencapai 98 Juta rupiah,” ungkap Win.

Win menambahkan dana yang terkumpulkan dalam kurun waktu tiga

hari tersebut tidak diberikan secara tunai, melainkan dalam bentuk barang, seperti pakaian anak-anak, pakaian dewasa, pembalut, popok bayi, bubur bayi, obat-obatan, dan makanan. Hal tersebut menurut Win sesuai dengan informasi yang diterimanya saat mengunjungi lokasi bencana pekan sebelumnya.

“Saat kami beserta pimpinan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, saat melepas Tim Sukarelawan bencana tanah longsor di Banjarnegara

DPR mengunjungi lokasi bencana dan penampungan korban, kami mendapat informasi bahwa untuk bahan makanan yang terkumpul sudah banyak, begitupun sumbangan uang tunai untuk membangun rumah warga. Namun yang masih kurang adalah pakaian anak-anak, bayi dan dewasa termasuk popok dan bubur bayi yang kesemuanya ikut terbawa longsor.

Win berharap agar sumbangan tersebut dapat bermanfaat bagi para korban bencana longsor. Lebih dari itu ia juga menilai bahwa sudah selayaknya warga di lokasi bencana tersebut untuk direlokasikan ke tempat lain, mengingat daerah tersebut termasuk dalam area rawan bencana longsor. Konon, longsor tersebut bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya daerah tersebut juga pernah terjadi longsor sejenis.

(Ayu), foto: iwan armanias/parle/hr.

BKSAP Gelar Diskusi Publik Diplomasi Budaya

Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengapresiasi langkah ANTV yang telah menayangkan serial Mahabarata yang notabene berasal dari India. Ini sekaligus dapat menjadi soft diplomasi Indonesia dengan Negara-negara lainnya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang digelar BKSAP DPR RI dengan tema “Diplomasi Budaya Melalui Pendekatan Pop Culture: Pengalaman Sukses Serial Mahabarata” Kamis (18/12) di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Diplomasi budaya sejatinya sudah dimulai sejak lama. Namun dengan adanya serial Mahabarata yang sangat disukai masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan sejatinya dapat meningkatkan diplomasi budaya kita (Indonesia-red) dengan India. Dengan kata lain soft diplomasi bisa berlangsung melalui pendekatan Pop Culture,” ungkap Nurhayati.

Terlebih lagi menurut Nurhayati kisah Mahabarata dari India ini sedikit banyak juga memiliki persamaan dengan kisah pewayangan yang merupakan budaya Indonesia. Selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam kisah tersebut juga sarat akan nilai ke-



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf saat menerima pemain serial Mahabarata dan Direksi ANTV

hidupan yang berguna dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Nurhayati menjelaskan, dalam buku Joseph Nye yang berjudul *Soft Power: The Means to Success in World Politics* bahwa soft power suatu negara terutama terdapat dalam tiga sumber yakni Kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri. Sehingga

diplomasi budaya merupakan bagian dari kekuatan tersebut yang bertujuan untuk membangun pendapat publik tentang sebuah Negara atau komunitas Internasional.

Dalam diskusi tersebut, selain dihadiri oleh Nurhayati, dan anggota BKSAP lainnya, seperti Melanie Leimina Suharli, Andi M Ghalib yang

notabene pernah menjadi Dutabesar Indonesia di India, direksi ANTV, tak ketinggalan juga sederet artis pendukung Mahabrata seperti Shaheer

Sheikh (Arjuna), Pooja Sharma (Dro-padi), Aham Sharma (Karna), Arav Chowdhary (Bisma), Rohit Bharadwaj (Yudistira), Saurav Gurjar (Bima), Arpit

Ranka (Duryodana), Vin Rana (Nakula), Lavanya Bhardwaj (Sadewa), Nissar Khan (Drona). (Ayu) foto:ry/parle/hr

Delegasi Vietnam Belajar Perumusan UU dari Setjen DPR RI



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

Setjen DPR RI kembali menjadi role model parlemen Negara lain. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan Wakil ketua Komisi bidang luar negeri Vietnam beserta staff ke

Indonesia untuk mempelajari proses perumusan undang-undang di Indonesia.

"Alhamdulillah kepercayaan Internasional kepada Indonesia, khususnya DPR RI semakin tinggi. Kali ini kami menerima Wakil Ketua Komisi bidang luar negeri Vietnam beserta staff. Ini kunjungan Vietnam yang pertama kali ke Indonesia, tujuannya tak lain ingin belajar dari Indonesia tentang perumusan undang-undang di DPR, termasuk di dalamnya tentang *content* atau isi dari undang-undang itu sendiri. Baik yang terkait dengan organisasi sipil (*Civil society organization*) dan juga Hak Azasi Manusia (HAM)," jelas Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti usai menerima Delegasi Parlemen Vietnam, Jumat (19/12) di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta.

Sementara itu bagi Kesetjanaan DPR sendiri hal itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan dan peningkatan pengetahuan staff kesetjanaan yang tujuan akhirnya pada peningkatan dukungan terhadap dewan. Namun lebih dari itu Win, mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga diharapkan sebagai sebuah *moment* yang tepat untuk lebih meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam. Karena, sejatinya sejak 1955 hubungan Indonesia dan Vietnam sudah mulai terjalin. Bahkan keduanya juga sempat bersama-sama mengikuti Konferensi Asia-Afrika.

Terkait dengan kondisi Vietnam yang masih menganut paham komunis lewat Partai Komunis di negaranya, diyakini Win hal tersebut bukan hambatan kedua Negara untuk saling bertukar informasi dan saling mempelajari sistem di kedua Negara. Karena pada dasarnya, di Indonesia sebelumnya juga ada Partai Komunis. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Sekjen DPR Buka RAK Koperasi

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti meminta Pengurus Koperasi Karyawan menjaga konsistensi dan selalu memberikan yang pelayanan terbaik bagi anggota dan bagi kemajuan organisasi. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Setjen DPR dan Pendidikan Koperasi di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (19/12).

Ia mengingatkan sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. "Anggotanya juga harus tertib memberikan kontribusi, menyampaikan iuran karena inilah yang akan dikembangkan melalui beberapa jenis usaha koperasi," tutur dia.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat membuka RAK Koperasi Setjen DPR RI



Sementara Ketua Koperasi Setjen DPR Mohammad Djazuli menjelaskan selama ini koperasi memang mengalami kesulitan modal yang paling terasa. Pengurus terus mengupayakan pengadaan modal sendiri dengan mensosialisasikan program Sijago, dengan keuntungan jasa yang tinggi satu persen dari Bank BUMN, juga bebas pajak sesuai aturan dan bebas biaya administrasi.

Ia menambahkan dalam kepemimpinannya melanjutkan hal positif dari program-program kepengurusan yang lalu seperti sistem keuangan yang sudah *online*, sehingga anggota bisa melihat jumlah simpanan, SHU dan hutangnya. Penanganan administrasi keuangan, mulai dari sistem sim-

pan pinjam sampai neraca juga sudah terkomputerisasi.

Pada bagian lain Djazuli mengungkapkan baru-baru ini koperasi melakukan kerjasama dengan Korpri mencari pengembang untuk pengadaan rumah tinggal bagi karyawan Setjen DPR yang belum memiliki rumah tinggal, juga melakukan kerjasama bantuan koperasi dan simpanan masa pensiun, ada jaminan kesehatan.

Untuk peningkatan pelayanan kepada anggota, seluruh karyawan koperasi akan dididik dengan pelayanan prima. “Jadi pelayanannya, senyumannya, penampilannya dan tempatnya akan dirubah menjadi tempat sekelas pelayanan di bank,” demikian Djazuli. (Spy)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Listrik Hambat Investasi di NTT

Permasalahan kurang tersedianya listrik menjadi kendala Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan investasi. Selain itu, kurang maksimalnya infrastruktur yang ada, mengakibatkan investor kurang tertarik menanamkan investasinya di NTT.

Setidaknya, dua masalah di atas yang menjadi bahan pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto ketika menerima DPRD Provinsi NTT. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jumat (19/12/14).

“NTT mempunyai potensi yang luar biasa. Di sana ada emas, dan potensi tambang lain. Dengan adanya investasi, tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masalahnya, kurang tersedianya listrik dan infrastruktur, investor jadi enggan datang,” kata Novanto.

Politisi yang juga berasal dari Dapil NTT ini juga menyoroti tentang PAD Provinsi NTT, yang hanya berjumlah Rp 800 miliar. Ia berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat menaikkan jumlahnya. Sehingga, DPRD dan Pemrov NTT harus dapat saling mendorong untuk memaksimalkan PAD.

“Soal bandara juga harus dibenahi. Bandara di daerah lain sudah banyak yang dibangun baru, namun bandara NTT belum. Padahal jumlah penumpang juga meningkat. Permasalahannya seperti ini selalu berkaitan dengan tanah,” imbuh Politisi Golkar ini.

Untuk itu, ia akan menjembatani permasalahan yang dihadapi DPRD NTT dengan Komisi terkait di DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTT Fabriel Beri Binna menjelaskan dari belanja daerah sebesar Rp 3,2 triliun, PAD NTT hanya Rp 800 miliar. Pihaknya dan Pemprov memiliki rencana untuk meningkatkan hingga Rp 1,2 triliun di tahun 2018.

“Tapi, ini pun belum cukup, sehingga kita perlu mendorong investasi. Kami memiliki potensi luar biasa, di perikanan, kelautan, pertambangan mineral, dan pariwisata. Namun kendalanya, untuk mengembangkan investasi ini, terkendala oleh listrik,” jelas Fabriel.



Ketua DPR RI Setya Novanto

Sedangkan, untuk infrastruktur jalan, saat ini NTT hanya memiliki jalan strategis sepanjang 2800 KM, dan jalan kabupaten hanya 24 ribu KM. Namun, untuk pembangunan kedua jenis jalan ini masih menggunakan APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

“Kami meminta, agar infrastruktur jalan ini bisa diintervensi melalui APBN,” tambah Fabriel.

Terkait dengan visi misi nasional tentang maritime, ia mengaku pihaknya sudah melakukan persiapan. Terutama rencana tol laut yang dicanangkan oleh Pemerintah era Presiden Joko Widodo.

“Kami sudah memiliki pelabuhan barang, pelabuhan penyebrangan, yang sudah selesai dibangun, maupun yang sedang dalam pembangunan. Nah, yang terpenting tinggal konektivitas antar pulau ini diperkuat. Kita sangat siap, persoalan utama kita cuma listrik,” tambah Fabriel.

Dalam kesempatan yang sama, juga dibahas berbagai permasalahan lain, seperti kondisi pendidikan di NTT. (sf)

foto: iwan armanias/parle/hr

Indonesia Harus Punya Satelit Mitigasi

Indonesia merupakan negara yang sarat bencana. Hampir setiap hari bencana selalu mengancam. Untuk itu, perlu terobosan teknologi dengan meluncurkan satelit mitigasi bencana.

Pemerintah harus berani mengusulkan pengadaan satelit tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan hal tersebut di Banjarmasin, Jawa Tengah, Rabu (17/12),

saat melihat langsung lokasi longsor. Di tengah bekas reruntuhan longsor, Fahri mengungkapkan, “Lokasi seperti ini banyak sekali mungkin ribuan. Setiap kali lewat di sini, orang selalu



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Pimpinan DPR lainnya dan Gubernur Jateng menyerahkan bantuan tanah longsor Banjarnegara

menilai pemandangannya yang indah. Nah, sekarang siapa yang bisa melacak bahwa tebing itu sedang bergerak dan jutaan rakyat yang tinggal di tebing itu tak ada yang melindungi,” katanya.

Sudah saatnya Indonesia punya satelit mitigasi bencana yang mampu mendeteksi ancaman bencana, seperti tanah longsor, gunung meletus, atau tsunami. Negara-negara maju sudah

memiliki satelit tersebut. Bahkan, dengan satelit itu, satu pohon yang ditebang di tengah hutan bisa terdeteksi.

“Saya usulkan pemerintah berani mengusulkan dana untuk pengadaan sistem mitigasi bencana nasional yang konprehensif berupa satelit mitigasi. Jadi, kita tembak satelit ke atas Nusantara kita, terutama di atas pulau Jawa ini, sehingga pergerakan tanah itu bisa

kita lacak secara rutin. Meskipun di situ enggak ada penduduk, kita juga bisa memberikan *warning* di kaki-kaki gunung,” tandas politisi PKS tersebut.

Sementara mengomentari soal relokasi penduduk yang terdampak longsor, Fahri mengusulkan agar mereka dipindah ke lokasi yang tidak jauh dari tempat asalnya yang dalam istilah Gubernur Jawa Tengah disebut transmigrasi lokal. Perhutani, sambung Fahri, memiliki banyak tanah di dekat lokasi longsor. Sebaiknya diberikan saja sebagian tanahnya untuk lahan relokasi penduduk setempat.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, untuk merelokasi penduduk butuh waktu agak lama, karena pembebasan lahannya tidak mudah. Sementara pemerintah pusat sendiri lewat Wapres Jusuf Kalla menjanjikan perumahan gratis bagi warga terdampak longsor di Banjarnegara.

“Wapres sudah mengatakan akan diberikan rumah. Saya kira itu harus menjadi *policy* berlanjut. Jangan hanya kepada warga yang sudah kena musibah, tetapi kepada warga yang rawan terkena musibah pun harus sudah dipikirkan relokasi rumahnya,” harap Fahri. (mh)/foto:husen/parle/iw.

Komisi IV DPR Akan Perjuangkan PPI Bonto Bahari, Maros

Pemerintahan Kabupaten Maros memiliki Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari di Dusun Sabang, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. PPI ini dibangun sejak tahun 2008 dan siap difungsikan tahun 2012, namun sampai sekarang ini belum tuntas-tuntas pembangunan pelabuhannya.

Hal ini diungkapkan Bupati Maros, Hatta Rahman saat menerima tim kunjungan kerja Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto, di Rumah Jabatan Bupati Maros belum lama ini.

Ia mengatakan, setiap tahun pihaknya mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Perikanan. Tahun 2013 mendapat bantuan kurang lebih Rp 25 miliar tapi sampai sekarang belum selesai pembangunan pelabuhannya, karena pencairan ang-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat pertemuan dengan Bupati Maros dan jajarannya

garannya itu sedikit-sedikit. Padahal, PPI Bonto Bahari yang menjadi salah satu ikon kebanggaan Maros pada dasarnya untuk pelabuhan perikanan, tapi tidak menutup kemungkinan akan disulap menjadi pelabuhan komoditi.

Bupati Maros berharap Komisi IV dapat mendukung penyelesaian pembangunan PPI Bonto Bahari melalui bantuan dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan ini menjadi salah satu agenda untuk diperjuangkan oleh Komisi IV DPR RI,” harapnya.

Anggota Tim Kunker Hamka B. Kadi dari Fraksi Partai Golkar membenarkan bahwa bantuan anggaran untuk PPI di Sulsel itu sangat-sangat sedikit, khususnya di sektor perikanan. “Pelabuhan perikanan memang menjadi masalah khususnya di PPI, tapi itu bukan hanya di Maros dan di Takalar saja,” ujar Hamka.

Hal ini, lanjut Hamka, sudah disampaikan kepada Eselon I Kementerian Kelautan, dan berdasarkan informasi yang diperoleh memang akan dipri-

oritaskan pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Ia menyampaikan mubazir proyek ini kalau tidak selesai dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nelayan. “Oleh karena itu kita mencoba menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Insya Allah, Komisi IV memperjuangkan proyek yang diusulkan terutama untuk menyelesaikan PPI tadi,” jelasnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Mengawatirkan Tingginya Angka Penderita HIV-AIDS di Kaltim

Angka penderita HIV-AIDS di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mengawatirkan. Tercatat ada 265 penderita positif dan 165 di antaranya sudah meninggal dunia. Ini temuan yang luar biasa dan perlu perhatian serius semua pihak di Kaltim.

Demikian terungkap saat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kaltim. Anggota tim Komisi IX Imam Suroso (F-PDI Perjuangan) yang ikut serta dalam kunker tersebut mengaku, terperangah dengan temuan angka ini. Menurutnya ini kejadian yang luar biasa. Pihaknya menghimbau agar Dinas Kesehatan setempat segera melakukan aksi preventif terhadap penularan virus mematikan itu. Balikpapan merupakan wilayah tertinggi angka pengidap HIV-AIDS di Kaltim.

“Saya sudah minta Kepala Dinas Kesehatan untuk mendrop obat antivirus yang menghilangkan virus HIV itu. Pencegahan preventif perlu dilakukan. Contohnya, semua kompleks lokalisasi, pub, karaoke, hukumnya wajib untuk



Anggota Tim Kunker Komisi IX DPR Imam Suroso

diinjeksi antivirus. Positif atau negatif terjangkit HIV harus disuntik. Itu tanggung jawab puskesmas dan rumah sakit setempat. Kalau tidak mau disuntik usir saja, karena bila dibiarkan bisa berbahaya,” katanya di Balikpapan, Kaltim, Selasa (9/12).

Seperti diketahui, Kaltim merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, berupa gas dan batubara. Kekayaan tambang tersebut mengundang para pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia datang

ke Kaltim. Roda perekonomian Kaltim pun meningkat pesat. Bisnis hiburan malam pun menjamur. Dan bersama kedatangan kaum urban itu, ada yang membawa virus HIV dan bekerja di berbagai sektor, terutama di pertambangan dan lokalisasi.

Selama ini, nilai Imam, Pemda Balikpapan dan Pemprov Kaltim belum optimal melakukan pencegahan. Puskesmas setempat harus keliling memberi pemahaman bagi para pekerja seks di tempat lokalisasi. Kesehatan para pekerja dan pendatang harus diperhatikan. “Selain suntik anti HIV, suntik antisivilis juga perlu diberikan. Semua virus ini mudah mewabah,” ungkap Imam.

Ditambahkan Imam, dari angka penderita HIV-AIDS di Balikpapan, mungkin masih banyak yang belum terdeteksi oleh dinas kesehatan setempat. Bila sudah banyak yang terdeteksi mengidap HIV, menurut Imam, keberadaannya perlu dilokalisasi agar daya tularnya tidak meluas. (mh) foto:mh/parle

Kekosongan Kursi Dirut Bank Sumut Dipertanyakan

Komisi XI DPR RI akan menanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat perihal berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direktur Utama (Dirut) PT. Bank Sumut yang sudah lama tak diisi. Hal ini menjadi temuan menarik saat Komisi XI DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Su-



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu

matera Utara (Sumut).

“Kalau OJK (Wilayah) Sumatera tidak mampu menanganinya maka komisi XI akan mempertanyakan masalah ini ke OJK Pusat,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Gedung BI Jalan Balai Kota Medan, Senin malam (8/12). Rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR bertemu dengan Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah, dan pimpinan perbankan di Medan, termasuk Direktur Umum PT. Bank Sumut HM Yahya dan Direktur Pemasaran Ester Junita Ginting.

Lowongnya Dirut PT. Bank Sumut yang sudah hampir 2,5 tahun menjadi bahasan hangat dalam pertemuan tersebut. Anggota Komisi XI Hasrul Saleh mempertanyakan kepada OJK terkait struktur pengurus bank yang belum lengkap, yang berpengaruh pada kinerja bank. “Apakah OJK menganggap hal ini tidak penting atau sengaja melakukan pembiaran?” kritik Hasrul. Jika memang demikian, Hasrul menilai OJK tidak maksimal melakukan tugasnya menga-

wasi bank.

Sementara itu, Gus Irawan mengatakan seharusnya OJK bisa mengintervensi bank tersebut karena sudah 2,5 tahun Bank Sumut tanpa Dirut. Jika tetap dibiarkan, dikhawatirkan kinerja Bank Sumut ke depan akan terus merosot. Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa Komisi XI DPR sudah pernah bertemu dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) membicarakan masalah Bank Sumut. Dari situlah terungkap soal kekosongan jabatan Dirut. “Ini kesannya pembiaran bagi kita,” jelas Gus.

Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie mengakui masalah kekosongan Dirut Bank Sumut. Menurutnya, sudah dua kali diajukan calon Dirut dan Direksi lain tapi tidak lulus *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan). Achmad Fauzie berharap, Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang memegang amanah dapat segera menyelesaikannya. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk yang ketiga kali sudah bisa direalisasikan,” pungkas Fauzie. (Naefuroji) foto: odjie/parle/hr

Sekjen DPR Lantik Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan



Pelantikan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR RI Satyanta Nugraha

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti melantik Satyanta Nugraha sebagai Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Jum'at (9/10), di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

Menurut Sekjen DPR, pelantikan Deputi ini untuk melengkapi struktur organisasi Setjen DPR, terutama dalam memberikan dukungan dalam fungsi anggaran. “Tugas dari Deputi Anggaran dan Pengawasan mengkoordinasikan dukungan mulai dari teknis hingga keahlian untuk pelaksanaan fungsi anggaran,” jelasnya.

Sekjen DPR yang akrab dipanggil Win ini mengharapkan Deputi Anggaran dan Pengawasan dapat segera melaksanakan tugasnya. “Hari ini, Menteri Keuangan akan menyampaikan RUU APBN Perubahan, selanjutnya jajaran Deputi Anggaran dan Pengawasan akan melakukan kajian-kajian sebagai masukan kepada Alat kelengkapan Dewan untuk pembahasan dengan Pemerintah,” katanya.

Usai dilantik sebagai Deputi Anggaran dan Pengawasan Satyanta Nugraha, mengatakan bahwa banyak hal yang harus dilakukan terutama terkait masalah mendasar yaitu

reformasi birokrasi, diantaranya membuka cara berfikir setiap pegawai setjen DPR sehingga mampu menjadi pegawai profesional dan akuntabel.

“Secara khusus pegawai setjen sebagai unsur pendukung dan pelayanan kepada Dewan, pada bidang anggaran dan pengawasan memiliki peneliti, pustawakan, analis anggaran, dan arsiparis. Itu semua jabatan fungsional yang sekarang ini sedang dikembangkan. Diharapkan nantinya mampu memberikan dukungan yang sifatnya keahlian yang lebih profesional,” paparnya.

Satyanta menjelaskan Setjen DPR juga memiliki dukungan yang sifatnya teknis yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung, misalnya Teknologi Informasi yang menurutnya juga menjadi pekerjaan rumah untuk mengembangkan Teknologi Informasi. “Beberapa Parlemen memiliki yang disebut i-parlemen. Jadi perlu mendesain teknologi informasi bagi parlemen dalam rangka mendukung tiga fungsi Dewan,” tegasnya.

Selanjutnya, dukungan lain yang juga akan dikembangkan adalah perpustakaan, arsip dan dokumentasi, “Itu juga bagian penting dalam rangka mendukung Dewan dalam hal referensi bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di DPR,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam melaksanakan tugas pendukung dewan bidang anggaran dan pengawasan, setjen DPR sudah memiliki peraturan Menpan No.39 Tahun 2014 tentang Jabatan fungsional Analis Anggaran.

“Ini adalah satu-satunya jabatan fungsional yang pembinaannya dilakukan Setjen DPR. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya analis APBN nantinya yang dibina dan dinilai langsung oleh Setjen DPR, sehingga pekerjaan dukungan dan *outputnya* terfokus pada tiga fungsi pokok dewan, terutama untuk anggaran dan pengawasan dapat lebih maksimal,” jelas Satyanta Nugraha. (as) foto: andri/parle/hr



Pemerintah Harus Perhatikan Rumah Aman

Komisi VIII DPR meminta Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk memperhatikan rumah aman. Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wulandari, usai mengunjungi rumah aman Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa (9/12/14).

Politisi yang akrab dipanggil Ade menyatakan, walaupun status rumah aman Daurmala bukan milik Negara, namun kiprahnya sudah sangat membantu masyarakat Malut. Sehingga, pemerintah, baik pusat maupun daerah juga harus memperhatikan kondisi rumah aman ini.

“Mengenai Daurmala, ini kan sebenarnya bukan milik negara, tapi swasta. Selama 4 tahun terakhir, pendanaannya dari donatur saja. Kalau saya lihat, ini bisa diberdayakan lebih dari yang ada saat ini. Sehingga, anggarannya bisa dialokasikan dari APBD. Harapan saya seperti itu, sehingga dapat lebih berkembang,” jelas Ade.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dengan adanya Daurmala ini, telah membantu permasalahan masyarakat, terutama permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasalnya, berdasarkan pantauannya,

instansi pemerintah yang menangani KDRT ini tidak berjalan maksimal. Bahkan, justru peran dari Daurmala lebih maksimal.

“Kami berharap, dapat membantu anggaran Daurmala, sehingga mendapatkan anggaran dari APBD. Sehingga mendapatkan kepastian anggaran. Karena Daurmala ini berpotensi berkembang menjadi sangat bagus,” tambah Ade.

Namun, Politisi asal Dapil Jakarta 1 ini menyayangkan, saat ini kantor Daurmala hanya ada satu. Padahal, cakupan Provinsi Malut ini cukup luas. Belum lagi, daerahnya merupakan kepulauan.

“Kami berharap, jika sudah mendapat alokasi dari APBD, dan sudah ada programnya dari Pemda, maka akan lebih baik di setiap kecamatan ada, karena wilayah Ternate ini kan kepulauan. Di setiap kecamatan, untuk membantu Daurmala pusat. Namun karena ini belum ada anggarannya, akan kami coba bantu,” tambah Ade.

Untuk itu, ia berjanji akan memperjuangkan mengenai hal ini. Ia berharap, Pemerintah Pusat dapat juga memberikan perhatiannya anggarannya, melalui APBN. Sehingga kiprah Daurmala ini bisa lebih berkembang



Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astuti Wulandari

dan membantu pemerintah.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII Ruskati Ali Baal. Ia mengapresiasi rumah aman Daurmala yang telah melindungi kaum perempuan di Maluku Utara. Bahkan, ia berharap setiap daerah di Indonesia, memiliki rumah aman seperti Daurmala. Sehingga kaum perempuan dapat terlindungi.

“Perempuan harus didukung dan dilindungi. Persoalan-persoalan tidak akan berhenti. Kita sempat melihat Daurmala, ada pejuangnya yang melindungi kaum perempuan. Saya harapkan pemerintah setempat untuk memberikan perhatian terhadap kaum perempuan. Karena, tanpa ada wanita di dunia ini, saya rasa pemerintahan bisa lumpuh,” imbuh Ruskati. (sf) foto: sofyan/parle/hr

Komisi VII Temukan Tujuh PLTU Mangkrak



Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi

Komisi VII DPR RI menemukan tujuh proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Palembang, Sumatera Selatan yang mandek alias mangkrak. Padahal menurut Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi, PLTU tersebut sangat

dibutuhkan untuk menyuplai listrik tidak hanya di kawasan Sumatera, namun juga di Pulau Jawa.

“Kalau tidak kesini (Palembang-red) kami tidak tahu bahwa selama ini ada tujuh PLTU yang tidak jalan. Ini masalah yang sangat krusial, karena PLTU tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyuplai listrik di wilayah Sumatera saja, melainkan juga di Jawa,” jelas Mulyadi saat kunjungan kerja ke Palembang, Senin (8/12).

Mulyadi menambahkan, dari ke tujuh PLTU tersebut sejatinya mampu menghasilkan 5 (lima) ribu megawatt listrik. Sehingga diharapkan mampu mengatasi keterbatasan pasokan listrik di beberapa wilayah di Sumatera.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki men-

gatakan bahwa dua dari tujuh proyek PLTU dibatalkan dan sisanya terpaksa ditender ulang.

“Dua dari tujuh proyek PLTU di Sum-sel dibatalkan, sisanya ditender ulang, itupun tidak juga jalan,” ungkap Ishak.

Ishak memberi masukan kepada DPR agar proyek PLTU itu sebaiknya ditunjuk langsung saja oleh negara dan tidak melalui proses tender. Jika kembali ditenderkan, ia khawatir proyek tersebut akan tetap tidak jalan alias mangkrak.

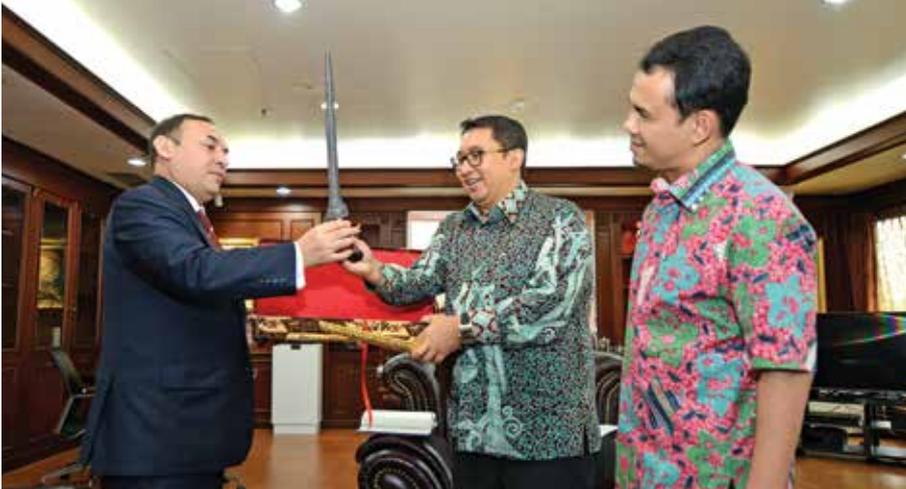
Menanggapi hal tersebut, Mulyadi mengatakan akan segera meminta penjelasan dari PT PLN (persero) sebagai pihak berwenang. Menurut Mulyadi, sudah dijadwalkan Selasa (9/12) Komisi VII akan menggelar rapat dengan jajaran Direksi PLN.

“Kami akan meminta penjelasan dari PLN kenapa bisa terjadi demikian, sekaligus mencari solusi terbaik agar

proyek tersebut bisa segera berjalan, dengan demikian keterbatasan listrik pun dapat segera teratasi,” pungk

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.

DPR Berharap Hubungan Kerjasama Uzbekistan dan Indonesia Ditingkatkan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua Komisi I Mahfudz Sidiq saat menerima Duta Besar Republik Uzbekistan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap hubungan kerjasama Indonesia dan Uzbekistan dapat ditingkatkan. Menurut Fadli Zon, Uzbekistan memiliki banyak kesamaan-kesamaan karakteristik antara kedua negara dan diharapkan dengan kesamaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hubungan bilateral kedua negara.

Demikian disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Uzbekistan Shavkat Jamalov, Selasa (9/12) di gedung DPR.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon didampingi Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq. Mahfudz banyak

menanyakan tentang sistem dan lembaga legislatif di Uzbekistan.

Shavkat Jamalov menjelaskan Majelis Agung Uzbekistan atau (Oliy Majlis) memiliki 120 anggota di *Legislative Chamber* atau Dewan Legislatif yang dipilih langsung untuk lima tahun dalam satu periode dan 100 anggota di majelis tinggi (Senat) serta 84 anggota yang dipilih untuk setiap distrik, regional dan kota atau senator dari daerah (non partisan) serta 16 anggota yang ditunjuk oleh presiden. “Sebanyak 120 anggota yang berasal dari kalangan profesional dan ahli, karena harus mempersiapkan dan membuat rancangan undang-undang,” jelasnya.

Shavkat Jamalov mengundang Ketua DPR untuk mengunjungi Tashkent, ibukota negara Uzbekistan. Menurut Shaukat, Indonesia sangat berarti bagi Uzbekistan karena Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Uzbekistan.

Pada kesempatan tersebut juga diperbincangkan tentang keberadaan makam Imam Bukhari di wilayah Samarkand. Imam Bukhari meninggalkan berbagai kitab yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia, salah satunya al Jami’us Shahih yang merupakan kumpulan hadis-hadis shahih yang dinilai sebagai kitab paling shahih setelah Al-Qur’an.

Diungkapkan Shavkat Jamalov bahwa masyarakat Samarkand sangat menghargai permintaan khusus dari mantan Presiden RI Sukarno kepada mantan Presiden Nikita Khrushchev agar membuka kota Samarkand bagi peziarah dan menaruh perhatian khusus dalam menjaga warisan bersejarah Imam Besar Bukhari. Selain itu, kunjungan mantan Presiden Suharto ke Makam Imam Bukhari juga membawa perubahan signifikan pada pelayanan peziarah di situs dimaksud.

Mahfudz Sidiq juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPR telah melakukan kunjungan ke Uzbekistan yang dipimpin oleh Ramadhan Pohan pada awal Mei 2013 pada DPR periode sebelumnya. (skr), foto : andri/parle/hr.

Komisi V DPR Pertanyakan Penyimpangan PSO KA Rp. 682.7 Miliar

Komisi V DPR Pertanyakan penyimpangan dalam pengelolaan serta pelaksanaan PSO Kerta Api (KA) tahun 2013 sebesar Rp. 682,76 Miliar.

“Penghitungan PSO yang tidak didasarkan aturan perundang-undang

an. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan BPK,” terang Wakil ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia kepada Parlemen, Jumat, (5/12).

Pada pemeriksaan BPK semester I



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana

2014 yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyim-



pangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang

tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Menhub juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tariff, termasuk didalamnya IMO dan TAC.

“Untuk penetapan PSO ini, kami

minta Menhub segera merealisasikan pengenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” kata Yudi. *(sugeng), foto : dok/parle/hr.*

Pimpinan Harapkan Perpustakaan Dapat Mendukung Kinerja DPR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat mengunjungi Perpustakaan DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap, Perpustakaan DPR dapat mendukung kinerja Anggota DPR dalam melaksanakan tiga fungsi DPR. Terutama, untuk fungsi DPR di bidang legislasi. Mengingat, ketika DPR menyusun Rancangan Undang-undang, dibutuhkan referensi dan kajian yang mendalam.

“Kita ingin perpustakaan ini menopang keperluan Anggota. Pasalnya, fungsi DPR di bidang legislasi ini kan membuat Undang-undang, sehingga kajiannya harus mendalam, menyangkut substansi banyak hal. Dan hasil pembahasan pun ada depositnya di sini (perpustakaan), sehingga bisa diakses oleh masyarakat untuk keperluan penelitian, ataupun lainnya,” kata Fadli.

Demikian dikatakan Fadli, usai mengunjungi Perpustakaan DPR, yang

terletak di belakang Gedung Nusantara II, Jumat (5/12/14) sore. Fadli menyempatkan berbincang dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi Rahayu Setya Wardani, dan para pustakawan. Ia pun menilik setiap bagian perpustakaan, dan mengecek setiap koleksi buku.

Politisi Gerindra ini menyatakan, koleksi yang ada sekarang memang masih terbatas. Ia cukup prihatin dengan koleksi buku, terutama koleksi buku yang terbilang berumur tua dan warisan dari berbagai perpustakaan jaman dahulu. Mengingat, sebelum menempati tempat yang terakhir ini, Perpustakaan DPR sempat berpindah tempat sampai tujuh kali.

“Saya kira, sekarang sudah tepat saatnya DPR harus memiliki gedung perpustakaan yang baru dan represen-

tatif, sehingga dapat menjadi pusat ilmu. Akses juga tidak hanya oleh Anggota DPR, peneliti, maupun pegawai di lingkungan DPR, tapi bisa diakses oleh masyarakat luas,” imbuh Fadli.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini berjanji akan meningkatkan peran dari perpustakaan, risalah, maupun arsip. Sehingga dapat mendukung keperluan anggota dan masyarakat umum. Apalagi, nantinya Perpustakaan DPR akan diarahkan ke special library, dan dirancang menjadi semacam *library of congress*, namun dalam skala yang lebih kecil.

“Perpustakaan ini perlu diperluas, dan memiliki gedung tersendiri, karena sebenarnya, perpustakaan itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi menjadi salah satu inti,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai koleksi buku yang sudah memasuki era *electronic book (e-book)*, Fadli menyatakan, buku cetak tetap masih dibutuhkan dan diminati. Apalagi, koleksi buku cetak tetap memiliki kekhasan dan tampilan yang berbeda dengan *e-book*.

“Koleksi buku cetak tidak masalah. Tidak semua buku yang ada itu dapat kita nikmati dalam bentuk digital. Buku-buku lama yang ada di sini, seperti yang ada dari zaman Hindia Belanda, memang penting harus dipisahkan, diklasifikasi, untuk kemudian nantinya di-digitalisasi,” kata Fadli.

Bahkan, ia juga meminta, Perpustakaan DPR memiliki koleksi buku dalam bentuk *hardcopy* dan *e-book*. Ke depannya, ia berharap masyarakat luas dapat mengakses Perpustakaan DPR untuk mendapatkan sumber pengetahuan mengenai DPR maupun perpolitikan. *(sf)/foto:andri/parle/iw.*

Prolegnas DPR Lebih Selektif



Ketua DPR RI Setya Novanto

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR kini ditekankan lebih selektif dalam merancang berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang masuk. RUU harus diutamakan yang memiliki nilai kebutuhan paling tinggi bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto saat membacakan pidato penutupan masa sidang I, Jumat malam (5/12). “DPR juga akan lebih selektif dalam memilih RUU yang diusulkan agar sesuai dengan prioritas

kebutuhan. Semaksimal mungkin DPR akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan maupun pembahasan RUU,” kata Novanto.

Seperti diketahui, kegiatan di bidang legislasi telah dimulai dengan penetapan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3 sebagai bagian dari Prolegnas DPR RI Periode 2014-2019. Pembahasan RUU ini merupakan kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR.

Beberapa komisi di DPR, lanjut Novanto, sudah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menggali informasi lebih dalam tentang RUU apa saja yang perlu segera dibahas untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.

“Beberapa RUU yang menjadi perhatian DPR untuk dijadikan prioritas pembahasan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Transportasi, RUU tentang Arsitek, dan RUU tentang Penyandang Disabilitas,” ungkap Novanto.

Komisi II DPR RI bahkan telah mengadakan RDPU dengan empat pakar hukum tata negara untuk meminta masukan seputar Perpu No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sementara Komisi V DPR RI menggelar RDPU dengan beberapa pakar transportasi terkait rencana penyusunan RUU tentang Sistem Transportasi Nasional. Selain itu, pakar kearsitekan juga telah dihadirkan untuk menyusun RUU tentang Arsitek. (mh) foto:odjie/parle/hr

DPR Sahkan Revisi UU MD3

Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jumat (5/12/14) malam, akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengambilan keputusan tingkat II yang merupakan lanjutan dari pengesahan tingkat I di Pansus, berjalan lancar tanpa terjadi perdebatan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Revisi UU MD3 Saan Mustopa menjelaskan ada beberapa substansi yang direvisi dalam UU MD3. Dua pasal yang direvisi yakni pasal 74 ayat 3,4,5 dan 6, dan pasal 98, disepakati untuk dihapus. Pasal ini berisi tentang hak DPR yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang awalnya bisa digunakan di tingkat komisi. Artinya, setelah direvisi, hak DPR hanya berlaku dalam rapat paripurna saja.

Selain itu, revisi juga meliputi penambahan satu di kursi wakil ketua di setiap alat kelengkapan Dewan, dari semula tiga menjadi empat wakil. Kemudian, peniadaan aturan mengenai



Ketua Pansus Revisi UU MD3 Saan Mustopa didampingi Menkumham menyaksikan penandatanganan Draft RUU MD3 di Ruang Pansus

sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR.

Usai Saan melaporkan hasil pembahasan Pansus, Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin rapat paripurna

pun menanyakan kepada seluruh anggota DPR terhadap hasil laporan Pansus, apakah setuju atau tidak dengan revisi yang akan dilakukan.

“Apakah RUU perubahan UU MD3 Tahun 2014 dapat disetujui?” tanya Novanto kepada seluruh Anggota DPR yang hadir. Jawaban “Setuju” pun terdengar kompak dilontarkan Anggota DPR, sembari palu pimpinan diketuk,

sebagai tanda revisi UU ini disahkan.

Sebelumnya, pembahasan dilakukan oleh Pansus Revisi UU MD3 dengan dipimpin oleh Saan Mustopa (F-PD), dengan didampingi wakilnya, yaitu Arif Wibowo (F-PDIP), Epidardi Asda (F-PPP) dan Ahmad Riza Patria (F-P Gerindra).

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan fraksi menyampaikan

pandangan mini fraksi masing-masing terkait perubahan dua pasal UU MD3. Kesepuluh fraksi menyatakan setuju terhadap 8 poin. Satu poin adalah penambahan pasal terkait penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan. Sementara 7 poin adalah penghapusan ayat pada dua pasal di UU MD3. (sf)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Pasar Indonesia Harus Berdaulat



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pasar di tanah air yang tidak berdaya menahan produk impor yang bagi negara lain masuk kategori sampah. Ia menyebut maraknya pasar pakaian bekas, jeroan impor yang begitu mudahnya dijumpai di dalam negeri.

“Masyarakat banyak bertanya kenapa pasar pakaian bekas masih marak dimana-mana, mengapa jeroan saja masih impor, terakhir saya mendengar Brazil juga mau memasukkan daging

ayam ke Indonesia. Tidak bisakah mempertahankan kedaulatan kita di pasar sendiri,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan banyak negara sangat tertarik pasar dalam negeri yang sangat besar. Negara-negara maju akan terus berupaya men-setup Indonesia menjadi pasar terbuka bagi barang impor murah, bahkan masuk kategori sampah seperti baju bekas atau jeroan daging.

“Pasar baju bekas murah secara tidak langsung dapat mematikan industri garmen kecil dalam negeri, belum lagi penyakit yg menempel di dalamnya, namun perdagangan ini masih saja marak,” tutur dia.

Kemendag harus segera menjalankan kebijakan mengamankan pasar dalam negeri termasuk menggali keunggulan yang mungkin dapat dikemas dalam Indonesia Heritage. Salah satu peluang yang patut diperjuangkan adalah menjadikan pasar Indonesia sebagai hub ekspor produk halal.

“Disini Kemendag dituntut segera

untuk melakukan kerjasama lintas instansi, lebih kreatif, mengoptimalkan potensi pasar kita, kalau tidak maka Indonesia hanya dilihat sebagai pasar potensial yang besar, murah, dan bodoh,” tandasnya.

Pemerintah sendiri lawan SK Mendag telah melarang impor pakaian bekas sejak tahun 1982 lalu, namun faktanya disejumlah lokasi strategis di tanah air bermunculan pasar khusus pakaian bekas. Aparat Bea Cukai di Kepulauan Riau melaporkan sepanjang tahun 2014 telah menyita impor illegal 5000 ball pakaian bekas senilai Rp15 miliar.

Permendag no.46/2013 juga sudah membatasi impor jeroan hanya untuk keperluan industri atau keperluan khusus lainnya, namun pemantauan DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) ternyata daging impor kelas variety meat dan juga jeroan marak dijual di pasar tradisional kepada masyarakat umum. (iky) foto : ibnur/parle/hr.

Anggota Komisi V Apresiasi Langkah Tegas Menhub

Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sositomo mengapresiasi langkah Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang mengambil langkah tegas berupa pembekuan rute penerbangan Surabaya-Singapura pada maskapai penerbangan Airasia terkait pelanggaran waktu operasional Airasia rute Surabaya-Singapura.

“Perlu diapresiasi langkah Menhub tersebut, ini sebagai bukti sikap



Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sositomo

tegas menteri terhadap maskapai yang melakukan pelanggaran. Agar ke depan tidak ada lagi maskapai yang meremehkan aturan yang telah ditetapkan termasuk administrasi,” ungkap Politisi dari Fraksi PKS ketika dihubungi Parlemen, Senin (5/1).

Sigit menambahkan, selama ini maskapai terkesan hanya mementingkan bisnis semata, dan menomerduakan faktor safety atau keselamatan. De-

ngan adanya langkah tegas dari Menhub tersebut Sigit berharap dapat menjadi pelajaran bagi maskapai lainnya.

Meski demikian ia menilai penyelesaian Airasia tidak cukup pada pembekuan rute Surabaya-Jakarta saja, karena pelanggaran tersebut kemungkinan juga melibatkan pihak-pihak di internal Kementerian Perhubungan sendiri yang notabene sebagai pihak pemberi izin penerbangan.

“Menhubnya memang baru, tapi dalam Kementerian Perhubungan ada pejabat atau petugas yang ikut memberi izin penerbangan. Jika memang Airasia melakukan pelanggaran ke-

napa baru sekarang diketahui, setelah adanya musibah itu. Oleh karena itu saya berharap Menhub juga melakukan “bersih-bersih” terhadap jajaran Kemenhub,” tambah Sigit.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, jika proses evakuasi telah selesai, pihaknya akan segera memanggil Menteri Perhubungan terkait musibah itu, lebih khusus lagi atas pelanggaran waktu operasional maskapai tersebut.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura

yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara itu, pada hari Minggu (28/12/2014), Pesawat QZ8501 milik AirAsia juga membuka layanan rute tersebut.

Pada 2 Januari 2015 kemarin Kementerian Perhubungan melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No AU 008/1/1DRJU-DAU-2015 membekukan rute Surabaya-Singapura per tanggal tersebut. Kemenhub akan meninjau kembali sanksi tersebut setelah KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) menyelesaikan hasil investigasi terkait musibah jatuhnya AirAsia QZ8501. (Ayu) foto:ray/parle

Bansos Perlu Ditata Ulang Sehingga Beri Kemanfaatan Lebih Besar



Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan, dana Bantuan Sosial (Bansos) memang perlu ada penataan ulang, terutama pada pengalokasian maupun pada pos-pos penerimaan. Tetapi bahwa dana bansos sebagai sebuah stimulan untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga, kalau dihapus dirinya tidak setuju.

Yang terpenting kata politisi dari PPP ini, bagaimana mengefektifkan anggaran tersebut karena salah satu contoh dan tidak boleh menutup mata bahwa sebagian besar masyarakat kita beragama Islam.

“Sebagai mayoritas, maka begitu banyaknya tempat peribadatan maupun terkait ritual keagamaan. Banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan terkait dengan dana-dana bansos tersebut. Itu tidak bisa berjalan tanpa ada sebuah stimulan pemerintah,” ungkap Mustaqim kepada Parle di Jakarta, Selasa (23/12)

Hal itu diungkapkannya sehubungan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah akan menata ulang penyaluran Bansos dan hibah di seluruh pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Untuk saat ini, karena akhir tahun tahun, seluruh penyaluran dana bansos ditahan.

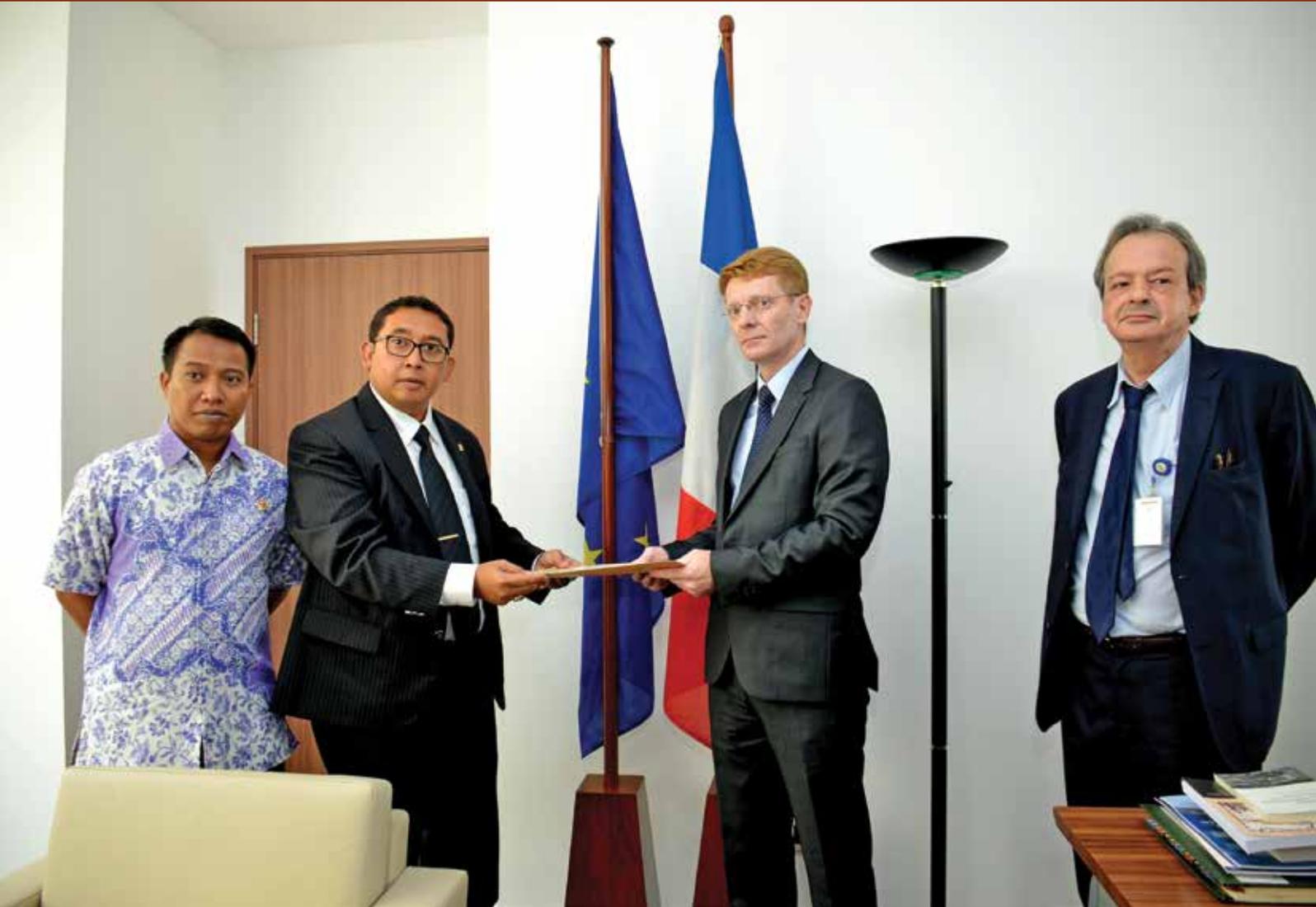
Menurut Mustaqim, perlunya penataan ulang itu memang sebuah keniscayaan, karena tanpa penataan ulang maka kita juga membayangkan betapa mengerikan dana-dana yang demikian besar apakah bisa sampai kepada masyarakat. “Jangan sampai salah penempatan, salah sasaran bahkan terjadi kebocoran di tengah jalan. Ini menjadikan saya miris,” tegas dia.

Karena itu selaku anggota Dewan yang berpasangan kerja dengan Kemensos, ia menyatakan setuju untuk dilakukan penataan ulang Bansos sehingga ke depan bisa memberi kemanfaatan yang lebih besar.

Memang sungguh susah ditepis, sambung Mustaqim, tidak bisa menutup mata kadang-kadang pimpinan daerah memanfaatkan dana bansos dalam rangka kepentingan politik lokal. “Tetapi ini bisa diatur ulang karena kalau regulasinya jelas dan tepat, diimbangi dengan *punishment* maka insya Allah masih sampai kepada warga masyarakat,” katanya.

Tetapi lanjutnya, harus dicatat bahwa kepala daerah atau siapapun yang mempunyai kepentingan politik lokal di daerah itu tidak boleh lagi bermain-main dengan dana bansos yang disalurkan melalui anggaran daerah. Kalau itu terjadi, sungguh sangat tidak tepat sasaran dan bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Menyinggung penyaluran dana bansos untuk kartu sehat atau kartu pintar, Mustaqim justru menegaskan sebelum bicara alokasi, maka yang perlu adalah payung hukum penyaluran dana-dana tersebut dan dibahas dengan DPR. Tanpa payung hukum yang kuat dikhawatirkan akan melanggar Undang-undang. Kalau sudah ada payung hukumnya, politisi Senayan ini memper silahkan *posting* alokasi dana sehingga sampai kepada masyarakat tanpa hambatan apa-apa dan berjalan baik. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan duka cita kepada kuasa usaha Kedubes Perancis

DPR Sampaikan Duka Cita Penembakan di Kantor Media Perancis

Wakil Ketua DPR RI kordinator bidang Politik Hukum dan HAM, Fadli Zon mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa penembakan di kantor Majalah Charlie Hebdo di Paris, Perancis, yang menewaskan 12 orang. Hal itu diungkapkannya langsung kepada Kuasa Usaha Kedutaan besar Perancis di Indonesia, Stephane Baumgarth di Kantor Kedubes Perancis di Jakarta, Kamis (8/1).

“Atas nama DPR RI dan rakyat Indonesia saya mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa penembakan yang terjadi di sebuah media di Perancis dan menewaskan

12 orang dan melukai sejumlah orang lainnya. Ini sebuah tindakan yang jelas tidak bisa diterima oleh kita semua, karena dalam perbedaan apapun tidak bisa dilakukan cara-cara yang brutal dan cara bar-bar seperti itu,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Pada kesempatan itu, Fadli dan Stephane sepakat bahwa tindakan tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam, dengan kata lain terorisme tidak ada hubungannya dengan Islam. Karena Indonesia dan negara di Timur Tengah yang mayoritas masyarakatnya muslim, serta organisasi muslim di Perancis juga mengutuk tindakan

penembakan tersebut.

Ditambahkan Fadli meski ada perbedaan namun untuk mengatasinya ada cara-cara yang lebih terhormat, bermartabat dan damai. Lebih lanjut Fadli menilai, peristiwa tersebut tidak lantas membuat Indonesia dan negara lain membuat sebuah *travel warning* (larangan berkunjung) ke Perancis, karena itu merupakan suatu kejadian yang sangat spesifik. Fadli yakin pemerintah Perancis bisa mengatasi hal itu dengan meningkatkan pengamanan yang akhirnya bisa dicontoh oleh negara lain. (Ayu) foto: naefurodjie/parle/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Duta Besar Ekuador didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Rabu (7/1)
Foto: Naefurodjie/Parle/Hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan duka cita kepada Kuasa Usaha Kedubes Perancis atas tragedi penembakan di kantor media Charlie Hebdo, Paris, Kamis (8/1) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr



Rapat Koordinasi menjelang Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke 23 di Ekuador dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Selasa (6/1). Foto: Andri/parle/Hr



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melepas relawan yang akan menyalurkan bantuan bencana tanah longsor di Banjarnegara, Senin (22/12) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr

